



Bab 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar dibebankan:

Tugas:

melaksanakan pelestarian kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pendokumentasian aspek-aspek nilai budaya, seni, dan film serta kesejarahan

fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan rencana dan program
- Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek nilai budaya, seni dan film serta kesejarahan
- Pengembangan hasil kajian
- Pelaksanaan pengemasan hasil kajian dan pemanfaatannya
- Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan
- Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi
- Pelaksanaan perlindungan
- Pelaksanaan pelayanan publik
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai pelestarian

Dengan Tupoksi ini, BPNB Makassar memainkan peran sangat berat dan penting dalam pembangunan jati-diri bangsa di tengah krisis karakter dan integrasi bangsa, memajukan ilmu pengetahuan, serta hasilnya bermuara pada pemanfaatan praktis di bidang pendidikan oleh masyarakat. Selain tugas pokok dan fungsi tersebut juga melaksanakan tugas penunjang lainnya seperti pembinaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan.

Sebagaimana amanat UUD 1945, bangsa Indonesia dituntut untuk memajukan kebudayaan nasional. Hal itu kemudian dijabarkan dalam perangkat kebijakan yang menuntun pelaksanaan amanat tersebut. Undang-undang No. 25 pasal 13 ayat (1) tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggariskan perlunya adanya suatu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Sebagai upaya lanjut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditegaskan dengan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dalam kaitan kebijakan itulah, program yang diselenggarakan perlu dilakukan pengukuran kinerja sesuai rencana pembangunan yang ditetapkan untuk melihat sejauhmana bidang pembangunan kebudayaan, khususnya Pelestarian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, memberi kontribusi terhadap program pembangunan secara keseluruhan.

Melihat kondisi dan potensi Kekayaan Budaya dan Nilai-nilai tradisional di wilayah kerja BPNB Makassar yang sangat luas terbentang, namun untuk menjangkau masih diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas program penelitian yang dibarengi pengembangan SDM secara terencana. Memang, perhatian pemerintah daerah dan masyarakat lokal sudah mulai tampak, akan tetapi belum cukup mendukung dengan program yang sejalan. BPNB Makassar masih memerlukan pemikiran dan dukungan bersama menjawab masalah *masih kurangnya tampaknya manfaat hasil penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional bagi masyarakat*. Belum optimalnya manfaat hasil penelitian juga berakar dari masih kurang dan lemahnya kompetensi sumberdaya manusia dari bidang Kebudayaan.

Masalah ini semakin berat karena penelitian dan pengembangan *Sejarah dan budaya belum cukup didukung oleh kebijakan lokal*. Padahal banyak hasil penelitian Sejarah dan Budaya potensial direproduksi menjadi sesuatu yang berdampak ekonomi

dalam berbagai bentuk, seperti karya ilmiah, informasi wisata, *event*, festival, cendramata dan lain-lain. Pada area kerja yang luas, penelitian masih sangat belum optimal untuk upaya rekonstruksi sejarah-kebudayaan, cara hidup dan proses kebudayaan manusia masa lalu hingga saat ini. Peran Pemda juga masih rendah dalam mendukung kegiatan – kegiatan kebudayaan, sebagai akibat dari lemahnya pemahaman akan manfaat dan peran strategisnya dalam pembangunan. Semua masalah tersebut merupakan hambatan dan tantangan yang membutuhkan penanganan Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar.

Pada saat ini kondisi yang diinginkan terhadap upaya penelitian dan pengembangan Sejarah dan Budaya di wilayah kerja BPNB Makassar, yaitu:

1. Perlunya penelitian yang mendalam terhadap Sejarah dan Nilai Tradisional agar rekonstruksi sejarah kebudayaan, cara hidup dan proses kebudayaan manusia masa lalu dapat dilakukan secara optimal
2. Frekuensi, kualitas penelitian dan pembiayaan dalam suatu penelitian perlu terus ditingkatkan .
3. Informasi dan publikasi terhadap hasil penelitian Sejarah dan budaya perlu makin diperluas dan digalakkan melalui media informasi yang efektif, aktual dan efisien agar apresiasi masyarakat meningkat.
4. Perlunya pelestarian dan perlindungan terhadap warisan sejarah dan Budaya agar tidak terjadi pengrusakan ataupun hilang akibat pengaruh alam ataupun tangan manusia.
5. perlu ditingkatkannya kerja sama dengan berbagai pihak agar kegiatan penyebarluasan informasi kebudayaan lebih optimal.
6. Perlunya pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, khususnya peneliti.

Untuk mengupayakan peningkatan kinerja dalam mengatasi masalah Sejarah dan Nilai Tradisional, BPNB Makassar telah menyusun “Rencana Kerja Tahunan 2013 sebagai tindaklanjut dari Renstra tahun 2010 sampai dengan 2014. Dalam Renja tahun 2013 ini BPNB Makassar memperoleh alokasi dana sebesar Rp. [10.325.131.000,-](#) (Sepuluh milyar tiga ratus dua puluh lima Juta seratus tiga puluh satu ribu Rupiah).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penyusunan LAKIP tahun 2013 memiliki manfaat untuk melihat apakah ada keterkaitan antara kebijakan, program dan kegiatan;

memberi pengukuran indikator *output*, *outcome*, proses dan benefit (anggaran); serta memperlihatkan apakah rencana strategis yang disusun sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga.

B. Kelembagaan Balai

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar yang berkedudukan di kota Makassar adalah balai yang tergolong paling awal didirikan dari 11 balai yang ada di tanah air kita. Awalnya UPT ini pertama kali bernama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada masa pemerintahan Presiden Abd. Rahman Wahid, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi dua. Departemen Pendidikan berdiri sendiri dengan nama Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan unsur kebudayaannya bergabung dengan Pariwisata yang kemudian membentuk Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sampai sekarang.

Dasar pikiran untuk pembentukan Balai ini pada mulanya adalah untuk membentuk satu lembaga yang dapat melakukan penelitian guna mendapatkan data tentang sejarah dan budaya pada suatu daerah. Oleh karena pembentukan itu memerlukan dana yang tidak sedikit dan personil yang banyak, maka diputuskan pembentukan itu berdasarkan pada kesamaan daerah, kedekatan geografis, serta kesamaan kebudayaan, bukan berdasarkan daerah administrasi, tentu saja dengan penekanan pada tema-tema tertentu. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balai menangani lebih dari satu Propinsi, bahkan ada Balai yang memiliki ruang gerak pada satu pulau, misalnya BPNB Pontianak yang menangani Pulau Kalimantan.

BPNB Makassar dan Yogyakarta didirikan pada tahun 1981 berdasarkan SK Mendikbud No. 0140/0/1981. Pada awal berdirinya BPNB merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah Direktur Jenderal Kebudayaan. Fungsi Balai pada waktu itu adalah melakukan pengamatan dan analisa kesejarahan dan nilai tradisional daerah yang tercermin dalam sistem sosial, sistem kepercayaan, lingkungan budaya dan tradisi lisan. Selain itu pula,

balai melakukan dokumentasi dan memberikan informasi kesejarahan dan nilai tradisional daerah serta melakukan tata usaha dan urusan rumah tanggal Balai.

Pada awalnya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata lebih menitikberatkan fungsi dan tugasnya pada kebijakan-kebijakan, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Badan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Sejak tanggal 26 Juni 2003, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata digabungkan ke dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Pada tahun 2003, lewat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor KM.52/OT.001/MKP/2003, BPNB merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan yang sehari-hari dilaksanakan oleh Asisten Deputi Urusan Tradisi. Pada bulan Agustus 2005, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berubah nama menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dan pada awal tahun 2010 kembali berubah menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata kembali. Dalam urusan administrasi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional yang berubah nama menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar pada tahun 2009 awal berada langsung di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.

Pada tahun 2012, setelah Kementerian Pendidikan bergabung kembali dengan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kembali Balai berubah nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 53 tahun 2012 tentang organisasi dan tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya. Dalam urusan administrasi, BPNB Makassar berada langsung dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar dalam mencapai visi dan misi didukung oleh sumber daya yang cukup memadai. BPNB Makassar memiliki staf peneliti sebanyak 24 orang yang terdiri atas 10 orang peneliti dalam bidang kesejarahan dan 14 orang lainnya meneliti kebudayaan dengan seluruh aspeknya. Jumlah SDM yang cukup memadai itu ditunjang pula oleh 19 orang staf Tata Usaha dan tentu saja dipimpin oleh 1 orang Kepala Sub Tata Usaha dan 1 orang Kepala.

C. Peran dan Fungsi BPNB Makassar dalam Pembangunan Lintas Sektor

Salah satu kontribusi yang dapat diberikan oleh BPNB Makassar adalah ikut mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional melalui stimulasi pembangunan sektor riil yang berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata. Diharapkan berbagai kajian yang telah dilakukan di BPNB Makassar baik itu berupa budaya maupun sejarah dapat membantu memecahkan masalah dan memberikan solusi dengan pendekatan berdasar.



Bab 2 PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010 - 2014

Perencanaan Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar merupakan suatu proses yang beorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkelanjutan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

BPNB Makassar telah menetapkan arah kebijakan program pembangunan sejarah dan budaya sebagai berikut:

1. Peningkatan peran kebudayaan sebagai wahana persatuan bangsa dan pembinaan ketahanan sejarah dan budaya masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
2. Peningkatan Pelestarian dan penelitian sejarah serta budaya dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sejarah dan budaya serta penanaman nilai-nilai sejarah, budaya, seni dan film.
3. Peningkatan kesadaran sejarah pada masyarakat dalam rangka pemulihan makna berbangsa dan bernegara bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
4. Pengembangan *data base* dan jaringan sistem informasi budaya di Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
5. Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan pariwisata dan sektor lainnya.

6. Peningkatan kerjasama dan koordinasi perencanaan budaya lintas sektor melalui kerjasama antarlembaga, antarwilayah, antarpelaku budaya.
7. Menggali kearifan lokal untuk diaplikasikan dalam pembangunan nasional dan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara

Berdasarkan masalah dan arah kebijakan yang dipaparkan pada bagian tersebut di atas, Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar akan melaksanakan **program pelestarian dan pengembangan budaya** yang diposisikan dalam kerangka menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkuat ketahanan sejarah dan budaya masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Selain itu, program pelestarian dan pengembangan budaya diarahkan kepada pemanfaatan secara optimal sejarah dan budaya dalam kerangka pengembangan pariwisata.

Mengacu arah kebijakan strategis pembangunan sejarah dan budaya yang telah ditetapkan, maka diawal masa peralihan BPNB Makassar menetapkan 1 program pokok pengembangan sejarah dan budaya di Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Selatan yaitu **Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Budaya** dengan pokok kegiatan yaitu :

1. Naskah Hasil Kajian Pelestarian Nilai Budaya
2. Dokumen Pelestarian Nilai Budaya
3. Karya Budaya yang diinventarisasi
4. Peserta Internalisasi nilai budaya
5. Layanan Perkantoran
6. Peratan dan Fasilitas Perkantoran

Program BPNB Makassar diarahkan pada kebijakan:

1. Meningkatkan peran sejarah dan nilai budaya sebagai pendorong persatuan dan kesatuan.
2. Mengembangkan benang merah pengikat bangsa dalam segala wujud budaya.
3. Meningkatkan adab dan nilai religius masyarakat di Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara yang berkualitas dan berakhlak.

Program yang akan dilaksanakan oleh BPNB Makassar merupakan kelanjutan dan pengembangan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, program yang dilaksanakan oleh BPNB Makassar juga merupakan penjabaran dari program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program yang dibuat merupakan upaya-upaya dalam mengatasi berbagai masalah sejarah dan nilai budaya yang ada dan berkembang di Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara serta perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, baik dalam tataran regional maupun nasional.

Untuk kebijakan pembangunan sejarah dan budaya di Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara yang akan datang merupakan kelanjutan arah kebijakan dan program tahun-tahun sebelumnya dengan pengembangan yang sesuai dengan tuntutan, arah, serta kondisi ril pembangunan yang sedang berjalan, baik dalam tataran lokal, regional, dan nasional.

1. Pernyataan Visi

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar, adalah salah satu UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai satu Balai yang bergerak dalam bidang penelitian, memiliki visi sebagai sesuatu yang dicita-citakan. Visi dari Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar adalah:

**“TERWUJUDNYA NILAI – NILAI SEJARAH DAN BUDAYA YANG
LESTARI SERTA BERKEMBANG MENUJU MASYARAKAT YANG
BERADAB”**

2. Pernyataan Misi

Dalam rangka mencapai visi itu, BPNB Makassar mempunyai misi untuk melakukan seoptimal mungkin penelitian, pengkajian, perekaman, penerbitan, seminar, penyuluhan, pendokumentasian, dan penyebarluasan (publikasi) mengenai kesejarahan, nilai tradisional, dan kepercayaan kepada tuhan Yang Maha Esa. Melalui misi itu BPNB Makassar berharap akan dapat melakukan beberapa hal, antara lain:

- 1. meningkatkan ketahanan budaya masyarakat, dan**

2. meningkatkan pemahaman *stakeholder* akan pentingnya pelestarian, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai sejarah, budaya, seni dan film.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi, maka ditetapkan tujuan pembangunan BPNB Makassar tahun 2010 – 2014 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kajian kebudayaan dan kesejarahan yang berkualitas
2. Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kesejarahan dan kebudayaan.
3. Terwujudnya pendokumentasian dan publikasi kesejarahan dan kebudayaan daerah
4. Terwujudnya pemanfaatan, pengembangan kesejarahan dan kebudayaan daerah
5. Terwujudnya SDM di BPNB Makassar berkualitas, kompetitif, dan kreatif serta inovatif.
6. Terwujudnya kerjasama antara instansi, Pemda, LSM, dll.
7. Terwujudnya fasilitas Sarana dan Prasarana perkantoran yang baik dan berkualitas untuk menunjang peningkatan kinerja

Seperti yang dikemukakan sejak awal bahwa penentuan satu tujuan harus relevan dengan visi dan misi. Sesuai dengan hal tersebut, maka BPNB Makassar memiliki 3 (tiga) tujuan utama yang ingin dicapai dalam mewujudkan visinya sebagai pusat bank data yang terpercaya. **Pertama** Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, **kedua** peningkatan mutu sumber daya, dan **ketiga** melestarikan nilai-nilai budaya. Ketiga tujuan utama ini diharapkan dapat mewujudkan keinginan BPNB untuk menjadi bank data terpercaya dan terkemuka dalam bidang kesejarahan dan kebudayaan. Diharapkan dengan peningkatan mutu penelitian secara tidak langsung akan menjadikan para peneliti menjadi profesional dibidangnya, dan pada gilirannya akan meningkatkan kinerja mereka untuk menghasilkan penelitian yang lebih banyak lagi.

Sasaran adalah suatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu 1 – 12 bulan. Dalam pengertian yang lebih luas, sasaran itu sama dengan tujuan jangka pendek. Dalam upaya untuk mencapai tujuan yang diletakkan pada level puncak harus dapat dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran sehingga dengan mudah dapat dimengerti dan dilaksanakan. Pentingnya penetapan sasaran yang dirumuskan dalam kalimat yang tepat akan memudahkan untuk membuat pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Dalam menentukan sasaran suatu organisasi, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Kriteria itu antara lain:

1. merupakan hasil yang dicapai;
2. menantang tetapi logis, yaitu bisa diprediksi bahwa hal itu bisa dicapai dengan melihat kemampuan yang dimiliki;
3. memberikan kontribusi yang tinggi terhadap tujuan;
4. terkait dengan misi dan visi;
5. sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.

Secara keseluruhan, sasaran yang disusun itu harus memperhatikan spesifikasi, *measurable, attable* atau *achieveable, relevant* dan *time related*. Keseluruhan ini biasa disingkat dengan istilah SMART. Lain halnya dengan apa yang disarankan oleh Dr. Achmad S. Ruky yang mengklasifikasikan sasaran dalam empat kategori. Kategori itu adalah sasaran dasar, sasaran pemecahan masalah, sasaran inovatif, dan sasaran pengembangan pribadi.

Merujuk pada hal-hal di atas, BPNB Makassar memiliki beberapa sasaran utama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat tentang sejarah dan budaya
2. Meningkatnya kualitas kinerja BPNB Makassar, baik tenaga peneliti maupun tenaga administrasi
3. Meningkatnya kinerja pegawai melalui peningkatan sarana pendukung, gaji dan tunjangan

B. Penetapan Kinerja 2013

Proses penjabaran dan sasaran, serta program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 2010 – 2014, akan dilaksanakan oleh BPNB Makassar melalui berbagai kegiatan secara tahunan termasuk di dalamnya adalah perencanaan kinerja 2013 yang merupakan proses perencanaan kinerja yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan target kinerja tahun 2013 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi BPNB Makassar tahun 2013.

Dengan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan BPNB Makassar, maka IKU harus terdapat dalam perencanaan kinerja dan menjadi tolak ukur utama keberhasilan BPNB Makassar.

1. Indikator Kinerja Utama merupakan gambaran kinerja yang sejalan dengan indikator Dirjen Kebudayaan, yaitu:
 01. Jumlah naskah kajian pelestarian nilai budaya
 02. Jumlah laporan peningkatan kapasitas dan peran kepercayaan terhadap Tuhan YME dan tradisi
 03. Jumlah inventarisasi perlindungan karya budaya
 04. Jumlah naskah hasil dokumentasi sejarah tradisonal
 05. Jumlah inventarisasi, penulisan, pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya
 06. Jumlah aktualisasi dan adaptasi sejarah dan nilai budaya di dalam kehidupan bermasyarakat
 07. Jumlah peserta apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya
 08. Jumlah karya budaya yang berhasil di inventarisasi
 09. Jumlah naskah inventarisasi Lembaga/ Komunitas Kepercayaan dan Nilai-Nilai TradisiIndikator utama tersebut menjadi acuan untuk menyusun indikator kinerja kegiatan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional yang berlaku secara nasional.

2. Indikator kinerja kegiatan Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar yang dimaksud merupakan gambaran indikator *output* program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional seluruh Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun indikator *output* Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar tahun 2013 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Naskah Hasil Kajian Pelestarian Nilai Budaya
2. Dokumen Pelestarian Nilai Budaya
3. Karya Budaya yang diinventarisasi
4. Peserta Internalisasi nilai budaya
5. Peserta Bimbingan Teknis Pelestarian Nilai Budaya
6. Layanan Perkantoran
7. Kendaraan Bermotor
8. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
9. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
10. Gedung/Bangunan

Untuk selanjutnya demi melihat rencana kinerja BPNB Makassar, lihat lampiran 1: Rencana Kinerja Tahunan TA. 2013. Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Setelah anggaran 2013 ditetapkan, maka disusunlah **Penetapan Kinerja 2013** yang merupakan komitmen BPNB Makassar untuk dicapai dalam tahun tersebut.

Sasaran strategis tahun 2013, indikator kinerja dan target kinerja disajikan pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2012
1	Meningkatnya hasil penelitian sejarah dan budaya	Jumlah naskah hasil kajian pelestarian nilai budaya	
2	Peningkatan kerjasama dan koordinasi perencanaan budaya lintas sektor melalui kerjasama antarlembaga, antarwilayah,		
3	Meningkatnya perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya	Jumlah dokumen pelestarian nilai budaya	

	tradisional	Jumlah karya budaya yang diinventarisasi	
4	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengamatan film dan apresiasi masyarakat tentang sejarah dan budayanya	Jumlah peserta internalisasi nilai budaya	
5	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja	Peserta Bimbingan Teknis Pelestarian Nilai Budaya	
6	terselenggaranya layanan perkantoran dan meningkatkan kinerja pegawai	jumlah bulan layanan perkantoran	
7	Meningkatnya pengadaaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik	Kendaraan Bermotor	
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	
		jumlah unit peralatan dan fasilitas perkantoran	
		Gedung/Bangunan	

C. Program dan Kegiatan 2013

Berdasarkan masalah dan arah kebijakan yang dipaparkan pada bagian tersebut di atas, Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar akan melaksanakan **program Pelestarian Budaya** yang diposisikan dalam kerangka menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkuat ketahanan sejarah dan budaya masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Selain itu, **Program Pelestarian Budaya** diarahkan kepada pemanfaatan secara optimal sejarah dan budaya dalam kerangka pengembangan pendidikan.

Mengacu kepada visi misi, tujuan dan sasaran; serta arah kebijakan strategis pembangunan sejarah dan budaya yang telah ditetapkan, maka Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar menetapkan 1 program pokok yaitu **Program Pelestarian Budaya** di Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Selatan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Program Pelestarian Budaya:

a. Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional

1. Naskah Hasil Kajian Pelestarian Nilai Budaya
2. Dokumen Pelestarian Nilai Budaya
3. Karya Budaya yang diinventarisasi
4. Peserta Internalisasi nilai budaya
5. Peserta Bimbingan Teknis Pelestarian Nilai Budaya
6. Layanan Perkantoran
7. Kendaraan Bermotor
8. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
9. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
10. Gedung/Bangunan

Program BPNB Makassar diarahkan pada kebijakan:

1. Meningkatkan hasil penelitian sejarah dan budaya
2. Peningkatan kerjasama dan koordinasi perencanaan budaya lintas sektor melalui kerjasama antarlembaga, antarwilayah, antarpelaku budaya
3. Meningkatnya perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional
4. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengamatan film dan apresiasi masyarakat tentang sejarah dan budayanya
5. terselenggaranya layanan perkantoran dan meningkatkan kinerja pegawai
6. Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik

Program yang akan dilaksanakan oleh BPNB Makassar merupakan kelanjutan dan pengembangan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, program yang dilaksanakan oleh BPNB Makassar juga merupakan penjabaran dari program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program yang dibuat merupakan upaya-upaya dalam mengatasi berbagai masalah sejarah dan budaya yang ada dan

berkembang di Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara serta perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, baik dalam tataran regional maupun nasional.

D. Anggaran 2013

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/AKTIVITAS	PAGU
1	Naskah hasil kajian pelestarian nilai budaya	1.865.270.000
2	Dokumen pelestarian nilai budaya	146.220.000
3	Karya Budaya yang diinventarisasi	196.270.000
4	Peserta Internalisasi Nilai Budaya	1.471.872.000
5	Peserta Bimbingan Teknis Pelestarian Nilai Budaya	233.075.000
6	Layanan Perkantoran	4.436.554.000
7	Kendaraan Bermotor	15.000.000
8	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	64.950.000
9	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	145.920.000
10	Gedung/Bangunan	1.750.000.000
J U M L A H:		10.325.131.000



Bab 3 AKUNTABILITAS KINERJA 2012

A. Gambaran Umum Akuntabilitas Kinerja 2012

Pada tahun anggaran 2013, Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar melaksanakan program Pelestarian Budaya melalui 1 program yaitu : Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Secara keseluruhan kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar tahun 2013 telah memenuhi dan sejalan dengan sasaran dan indikator Rencana Kinerja Tahunan 2013 yang ditetapkan.

A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Sebagai suatu implemtasi perencanaan program, sudah menjadi tanggung jawab instansi untuk mengukur sejauhmana kegiatan yang direncanakan dapat mencapai sasaran, program dan kegiatan dapat memperoleh *output*, manfaat, dan dampak. Karena itu, pengukuran kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai penjabaran dari RPJM 2010-2014.

Dalam pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2012, ditempuh dengan melalui empat langkah:

- a. *Pengumpulan data kinerja*. Pada langkah pertama ini, mula-mula dilakukan identifikasi seluruh data yang akan digunakan mengukur kinerja seluruh kegiatan, meliputi: (i) data indikator *input*, *output*, dan *outcome*; (ii) data pelaksanaan kegiatan.

- b. *Pengukuran kinerja* dengan melalui “Pengukuran pencapaian sasaran” dan “Pengukuran Kinerja Kegiatan”. Dalam pengukuran ini digunakan konsep “*Performance Gap Analysis*” sebagai hasil dari realisasi dibandingkan rencana.
- c. *Evaluasi Kinerja*. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan organisasi; memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap sistem AKIP, program dan kegiatan, keterkaitan dan keterpaduan kebijakan organisasi, evaluasi terhadap hasil yang diinginkan (*outcomes*), serta evaluasi atas akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- d. *Analisis Kinerja*. Langkah ini berupa: (i) pemaparan pelaksanaan kegiatan dan program serta hasil yang telah dicapai; (ii) melakukan reviu terhadap sasaran-sasaran organisasi apakah tercapai atau sejauhmana pencapaiannya; (iii) mengungkapkan beberapa indikator penting yang menjadi ukuran keberhasilan instansi atau seberapa capaian indikator kinerja yang ditetapkan; serta (iv) mengungkapkan faktor-faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan instansi.

Hasil pengukuran ini dituangkan dalam laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas atas capaian kinerja, antara lain melalui perbandingan antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan hasil (*outcomes*) yang telah dicapai. Dengan demikian, metodologi LAKIP ini dapat merupakan *Baseline* data yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lain atau bahkan sesungguhnya dapat mengurangi jenis dan jumlah laporan yang harus disiapkan oleh instansi pemerintah.

C. Capaian dan Analisis Kinerja 2013

Berdasarkan tugas dan pokok Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar yang dituangkan dalam rencana strategis (RPJM 2010-2014) dan rencana kinerja tahunan, maka dalam kaitan dengan pengukuran pencapaian sasaran kinerja, kegiatan terdiri atas 1 yaitu: Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Dalam pencapaian kinerja yang telah dicanangkan dalam perencanaan TA. 2013, maka seluruh program/kegiatan telah diupayakan dilaksanakan secara maksimal. Meskipun demikian disadari masih terdapat sejumlah masalah, kendala utama yang

membutuhkan pemecahan untuk pelaksanaan program/kegiatan ke depan.

Adapun kendala dan permasalahan yang dianggap *urgent* tersebut adalah:

- a. **Keterbatasan anggaran perjalanan dinas** untuk pelaksanaan setiap kegiatan. Padahal perjalanan dinas ini dianggap sangat dibutuhkan karena BPNB Makassar mencakup 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Luas wilayah kerja yang demikian menuntut BPNB Makassar untuk tetap memperhatikan ketiganya sedangkan perjalanan dinas yang terbatas membuat langkah BPNB Makassar juga terbatas. Setiap kegiatan, misal Lawatan Sejarah, Jejak Tradisi Daerah, Kemah Budaya mengharuskan kehadiran perwakilan untuk setiap wilayah, padahal dengan dibatasinya perjalanan dinas maka kuota kehadiran akan terbatas. Monitoring dan koordinasi dengan wilayah-wilayah kerja juga menjadi terbatas.
- b. **Anggaran yang dialokasikan ke BPNB Makassar dibandingkan luas wilayah BPNB Makassar dan jumlah pegawai yang dimiliki BPNB Makassar dianggap masih tidak proposional.** Pegawai yang berjumlah 47 jiwa menyerap anggaran gaji sebesar Rp. 3.320.203.000, sedangkan pagu anggaran saat ini sejumlah Rp. 10.325.131.000,-. Hal ini menyebabkan alokasi kegiatan sejumlah Rp. 7.004.928.000,- dianggap tidak proporsional untuk luas wilayah dengan jumlah pegawai yang dimiliki. Apalagi ditambah kenyataan ada BPNB lain yang memiliki jumlah pegawai yang lebih sedikit dan luas wilayah yang hampir sama namun alokasi pagu sama dengan BPNB Makassar.
- c. **Realisasi pagar tahap 2 adalah 152,9 m' dan bangunan 350 m².** Hal ini tidak sesuai dengan target dipa dikarenakan pada saat pengusulan anggaran dan dokumen untuk pembuatan dipa, belum melalui tahapan gambar. Sehingga perencana ketika mengusulkan hanya mengira-ngira luas yang ingin dicapai.



Bab 4

AKUNTABILITAS KINERJA

2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPNB Makassar tahun 2013 seharusnya merupakan LAKIP keempat dari periode Renstra 2010 – 2014 yang menggambarkan capaian kinerja dan memuat analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Namun karena, BPNB Makassar berubah struktur organisasi dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi langsung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka, LAKIP ini merupakan LAKIP kedua sejak perubahan struktur tersebut. Walaupun demikian, rencana strategis masih mengampu periode renstra yang sebelumnya. Semua indikator kinerja dapat tercapai seluruhnya, hal ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN (REALISASI)	%
Naskah hasil kajian pelestarian nilai budaya	31 naskah	31 naskah	100%
Dokumen pelestarian nilai budaya	12 dokumen	12 dokumen	100%
Karya Budaya yang diinventarisasi	51 karya budaya	51 karya budaya	100%
Peserta Internalisasi Nilai Budaya	1.300 peserta	1.300 peserta	100%
Peserta Bimbingan Teknis Pelestarian Nilai Budaya	100 peserta	100 peserta	100%
Layanan Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100%
Kendaraan Bermotor	1 unit	1 unit	100%

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	12 unit	12 unit	100%
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	66 unit	66 unit	100%
Gedung/Bangunan	2.640 m2	152,9 m' dan 350 m2	



Bab 5 PENUTUP

Dalam pencapaian kinerja yang telah dicanangkan dalam perencanaan, maka seluruh program/kegiatan telah diupayakan dilaksanakan secara maksimal. Meskipun demikian disadari masih terdapat sejumlah masalah, kendala utama yang membutuhkan pemecahan untuk pelaksanaan program/kegiatan ke depan. Berbagai masalah dan hambatan, sebagian dapat diatasi berkat kerja keras dan dedikasi seluruh staf.

Oleh karena itu, Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar perlu memperhatikan lima hal penting dalam rangka mengatasi kendala pelaksanaan program ke depan, yaitu:

1. Perlu lebih mengembangkan program yang bersifat *public participative research* di masa akan datang dengan model penelitian terfokus dan lebih mendalam dalam satu periode tahun anggaran, dengan penekanan *output* dan *outcomes* yang dapat ditindaklanjuti segera oleh balai atau lembaga terkait;
2. Dengan wilayah yang sangat luas dengan tingkat kesulitan menjangkau dan mahal, perlu perhatian dalam kesesuaian anggaran dengan medan penelitian agar dapat dihasilkan percepatan memperoleh data seluruh wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat.
3. Peningkatan mutu sumber daya manusia, khususnya tenaga fungsional dan teknisi sebagai ujung tombak peningkatan kinerja Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional perlu terus dilanjutkan. Guna pencapaian maksimal dalam peningkatan SDM, perlu dilakukan kursus dan pelatihan yang lebih intensif, peningkatan mutu pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, aktif mengikuti kegiatan ilmiah.
4. Upaya kerjasama masih perlu kerja keras, karena umumnya *stakeholder* awam terhadap Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. Karena itu, dalam upaya membangun program kemitraan butuh pemberian pemahaman pada tahap awal

dan tentu “program pendukung” di tingkat UPT untuk memperlihatkan dampaknya bagi kepentingan mereka upaya penelitian dan pengembangan kebudayaan di daerah.

5. Ketersediaan sarana-prasarana yang baik masih perlu terus ditingkatkan karena unsur ini merupakan penunjang dari kinerja instansi agar lebih maksimal, terutama yang berkaitan dengan peralatan penelitian lapangan, alat pengolah data hasil penelitian, dan sarana lainnya.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Rencana Strategik
2. Rencana Kinerja Tahunan
3. Penetapan Kinerja